



PRAKTIK BAIK DALAM PENILAIAN RISIKO BENCANA PARTISIPATIF

Penilaian Risiko Bencana Inklusif sebagai Landasan Perencanaan Penanggulangan Bencana

Penilaian Risiko Bencana (Bahasa Inggris: *Disaster Risk Assessment/DRA*) merupakan salah satu dokumen penting yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung kesiapsiagaan dan perencanaan tanggap bencana. DRA memberikan gambaran lengkap tentang risiko bencana serta menganalisis tingkat ancaman, kerentanan, dan kapasitas di wilayah tertentu. Proses DRA bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dampak dari potensi bencana, yang ditetapkan oleh BNPB (Peraturan No. 2/2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana) sebagai kerugian jiwa, hilangnya aset/mata pencaharian, dan kerusakan lingkungan. DRA adalah dokumen referensi penting bagi pemerintah daerah untuk pengembangan Rencana Penanggulangan Bencana mereka, yang pada gilirannya menjadi dasar untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan daerah.

Pada tanggal 16 Juni 2022, program SIAP SIAGA menyelenggarakan acara *peer learning* untuk membahas mengapa pengembangan DRA secara inklusif dan partisipatif bersifat strategis dan berkelanjutan. Dihadiri lebih dari 150 peserta dari 14 provinsi dan lembaga pemerintah pusat, acara daring ini mencoba mengungkap bagaimana dan mengapa pendekatan ini penting serta mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan. Empat narasumber diundang

untuk berbagi pengalaman dalam mengembangkan DRA yang inklusif dan partisipatif: Agus Hery Purnomo (BPBD, Provinsi Lombok Utara), Ardin (Bappeda, Sulawesi Tengah), Hasan Jaelani (Forum PRB Sampang, Jawa Timur), dan Eko Teguh Paripurno (UPN, Yogyakarta).

Beberapa poin kunci dan praktik yang baik diidentifikasi meliputi isu-isu seperti persiapan dan pengumpulan data, keterlibatan pemangku kepentingan utama, dan penggunaan DRA yang efektif untuk proses perencanaan pembangunan daerah.

Tiga Tips Memastikan Pengembangan PRB Partisipatif dan Inklusif

Memprioritaskan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif serta pendekatan kolaboratif untuk pengumpulan data

Pengembangan DRA sangat bergantung pada akses ke data yang berkualitas, terutama terkait dengan kemiskinan dan kerentanan. Data yang dibutuhkan bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif seperti data kemiskinan perlu dipilah dengan baik termasuk berdasarkan jenis kelamin, usia, kerentanan dan lokasi geografis. Dalam banyak kasus, data ini berasal dari instansi lain seperti Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, BPBD, atau pemerintah desa, sehingga prosedur untuk mengakses informasi tersebut harus jelas dan disepakati. Informasi ini harus dilengkapi dengan data kualitatif (yaitu data

kapasitas sosial, data kerentanan, serta data risiko) yang diperoleh melalui proses partisipatif dan inklusif dengan masyarakat. Memperoleh data disabilitas merupakan tantangan, dan dalam banyak kasus memerlukan masukan dari organisasi disabilitas, yang selanjutnya menunjukkan pentingnya pendekatan partisipatif. Selain itu, DRA memerlukan informasi teknis dan ilmiah untuk menilai konteks risiko dan kerentanan kawasan, sehingga masukan dari asosiasi profesional seperti Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Badan Meteorologi dan Geofisika Indonesia (BMKG), dan LSM yang fokus pada isu bencana sangat diperlukan.

Memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya Forum DRA

DRA perlu dikembangkan berdasarkan konteks politik, sumber daya dan kapasitas lokal. Pemangku kepentingan utama di masyarakat, termasuk tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat harus dilibatkan dalam pengumpulan dan analisis data, serta membantu menghadirkan perspektif perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

BPBD juga dapat memanfaatkan pengetahuan dari Forum PRB (Bahasa Inggris: *Disaster Risk Reduction (DRR) Forum*). Forum PRB sangat berguna dalam membantu memverifikasi informasi tentang masyarakat.

Memperkuat kepemilikan lokal atas DRA dan Proses Perencanaan Penanggulangan Bencana

DRA merupakan dasar penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan juga merupakan persyaratan wajib Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana. Agar relevan dengan konteks lokal, DRA harus disiapkan oleh pemerintah daerah dan melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa analisis didasarkan pada data yang sesuai.

Dalam beberapa kasus, penggunaan tenaga ahli eksternal untuk mengelola proses DRA memiliki partisipasi yang terbatas dari pemangku kepentingan lokal dan selanjutnya mempengaruhi kualitas analisis dan kepemilikan lokal.

Ketika persiapan DRA dipimpin oleh pemerintah daerah dengan partisipasi aktif masyarakat (sebagai kegiatan peningkatan kesadaran itu sendiri), ada pemahaman yang lebih baik tentang ancaman, kerentanan, dan kapasitas bencana. Pada gilirannya, hal ini mengarah pada kesadaran yang lebih besar tentang bagaimana mengembangkan rencana Penanggulangan Bencana dan komitmen untuk memprioritaskan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan yang lebih luas.

Kesimpulan

Rekomendasi di atas dikumpulkan dari wawasan pemerintah daerah di Indonesia selama pengembangan DRA untuk komunitas mereka. Ini bukanlah pelajaran akademis atau teoretis, melainkan rekomendasi praktis dari orang-orang yang telah berpartisipasi dalam proses DRA atau yang telah bekerja dengan dokumen DRA untuk menginformasikan perencanaan masa depan.

Secara keseluruhan, diakui bahwa DRA harus dipimpin oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber daya lokal dan memastikan relevansinya dengan konteks lokal. Namun, pengembangan DRA membutuhkan keahlian teknis yang sesuai, dan dengan demikian pemerintah daerah dapat memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya pemangku kepentingan lokal, seperti Forum PRB, yang mencakup akademisi dan pelaku sektor swasta dengan keahlian khusus.

Selain itu, dengan kepemilikan lokal atas DRA, Penanggulangan Bencana dan perencanaan pembangunan lokal yang lebih luas dapat ditingkatkan, melalui kepercayaan yang lebih besar. Selanjutnya, proses partisipatif, memastikan tingkat inklusi yang lebih besar dalam informasi, dan akibatnya meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk merencanakan, dan menanggapi, kebutuhan kelompok rentan dan terpinggirkan, terutama penyandang disabilitas, selama masa krisis. Hal ini, pada gilirannya, memperkuat ketahanan seluruh masyarakat.

Tentang SIAP SIAGA

SIAP SIAGA adalah program kemitraan lima tahun antara Pemerintah Indonesia dan Australia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan manajemen bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat di Indonesia dan di Kawasan Indo-Pasifik. Pendekatan kami terukur, reflektif, dan condong ke depan yang membantu kami memberikan hasil terbaik bagi DFAT dan masyarakat Indonesia.